

## Gubernur Edy Rahmayadi Malu, Sumut Peringkat 2 Provinsi Terkorup

MEDAN (IM) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyatakan, peringkat Sumut sebagai provinsi terkorup mengalami kenaikan pada tahun ini.

Sebelumnya, Sumut menempati posisi ketiga daerah terkorup, kemudian saat ini menempati posisi kedua.

Peringkat Sumut sebagai daerah dengan peringkat kedua terkorup di Indonesia berdasarkan informasi dari KPK. Gubernur Edy Rahmayadi mengaku malu atas peringkat yang diperoleh daerah yang dipimpinnya.

Edy menyatakan, meningkatkan peringkat Sumut

disebabkan banyaknya pejabat yang berurusan dengan hukum.

Tindakan para pejabat yang terjaring oleh KPK, dinilai telah mencoreng nama baik Sumut. Selain itu, tindakan oknum pejabat tersebut juga membuat malu seluruh masyarakat Sumut.

"Saya mengimbau kepada seluruh pejabat agar bersama-sama memperbaiki nama baik Sumut. Pejabat pemerintahan tidak memiliki hak atas uang rakyat, di mana kasus di Sumut banyak berkaitan dengan korupsi pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan," tukas Gubernur Edy. ● han

## Usai Pangkas Jabatan Eselon III dan IV, Kemendagri Kembali Sederhanakan Birokrasi

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Hudori, mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan kembali melakukan penyederhanaan birokrasi di lingkungan kementeriannya.

Melalui tahapan lanjutan ini, Kemendagri menargetkan penyederhanaan birokrasi secara bertahap dengan keseluruhan mencapai 70%.

Seperti diketahui salah satu langkah penyederhanaan birokrasi adalah dengan memangkas eselon III dan IV dari jabatan struktural. Di mana pejabat-pejabat eselon III dan IV dialihkan ke jabatan fungsional.

"Dengan penyederhanaan birokrasi yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini, kita berharap tujuan Bapak Presiden agar seluruh lini birokrasi dapat meningkatkan responsivitas dan kualitas output dari birokrasi itu sendiri, dan proses pengambilan keputusan dapat dipercepat akan segera tercapai," katanya, Jumat (11/6). Hudori mengatakan se-

belumnya Kemendagri telah melakukan peyederhanaan birokrasi tahap I pada akhir 2020 lalu. Pada tahapan itu, Kemendagri telah menyederhanakan sebanyak 808 pejabat struktural baik administrator maupun pengawas, menjadi pejabat fungsional yang mengacu pada keahlian dan kompetensi tertentu.

"Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri telah dilaksanakan sejak Januari Tahun 2020, sampai dengan pelantikan dalam penyederhanaan birokrasi dimaksud pada 30 Desember 2020," ujarnya.

Langkah penyetaraan jabatan ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Hudori menambahkan, berdasarkan peraturan itu, penentuan nomenklatur jabatan fungsional hasil penyetaraan, harus memperhatikan tugas, fungsi, dan nomenklatur organisasi. ● han

# 2 | Polhukam

IDN/ANTARA



**KETERANGAN PERS**  
**MENKOPOLHUKAM TENTANG UU ITE**  
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (kanan) didampingi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo (kiri) memberikan keterangan pers terkait UU ITE di Jakarta, Jumat (11/6). Dalam keterangan tersebut, Mahfud mengatakan UU ITE masih sangat diperlukan untuk mengatur lalu lintas komunikasi di dunia digital.

## DPR: Pemerintah Dinilai Tidak Etis Jika Menarik Pajak Sekolah

Pengenaan pajak pada sektor pendidikan di tengah pandemi akan menambah tinggi angka putus sekolah. Karena biaya sekolah akan menjadi tinggi.

JAKARTA (IM) - Pemerintah berencana memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa pendidikan. Hal ini tertuang dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Padahal dalam UU aslinya, jasa pendidikan masuk kategori jasa bebas PPN.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Himmatul Aliyah menolak rencana pemerintah yang akan memungut PPN dari jasa pendidikan dengan sejumlah pertimbangan.

Pertama, kata Himma,

pendidikan merupakan sektor yang setiap warga negara dijamin haknya untuk mendapatkannya. Pemerintah juga diamanatkan kewajiban untuk membiayai pendidikan warnanya. Ketentuan ini jelas tertuang dalam pasal 31 UUD 1945.

"Namun, rencana pemerintah mengenakan pajak di sektor pendidikan membuat masyarakat yang dijamin haknya justru dibebani kewajiban, dan pemerintah yang berkewajiban membiayai tapi justru memungut biaya pendidikan dari rakyat," kata Himma kepada wartawan di

Jakarta, Jumat (11/6).

"Ini tentu tidak etis sekaligus bertentangan dengan konstitusi. Jadi jika rencana tersebut diberlakukan dan UU disahkan akan rawan digugat di Mahkamah Konstitusi (MK)," ujarnya.

Kedua, kata Himma, pengenaan pajak pada sektor pendidikan akan membuat biaya pendidikan menjadi mahal, sehingga akan membebani masyarakat. Ini tentu akan menciptakan ketidakadilan karena pendidikan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat.

Dan hal ini jelas bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

"Disebutkan dalam UU tersebut bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan pen-

dikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif," terangnya.

Ketiga, kata legislator Dapil DKI Jakarta itu, pengenaan pajak pada sektor pendidikan di tengah pandemi akan menambah tinggi angka putus sekolah. Pandemi yang masih berlangsung telah menurunkan ketahanan ekonomi masyarakat, sehingga banyak siswa dari berbagai daerah di Indonesia mengalami energi terkuras.

"Pengenaan pajak pendidikan bisa menambah tinggi angka putus sekolah sehingga menurunkan angka partisipasi sekolah di Indonesia. Kondisi demikian tentu paradoks dengan visi pemerintah sendiri, yakni mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia maju," pungkas istri Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.

Selain jasa pendidikan, pemerintah juga bakal mengenakan PPN untuk sembako, seperti beras hingga telur. Rencana ini dirumuskan dalam RUU Ketentuan Umum Perpajakan, yang di dalamnya ada tiga opsi tarif pengenaan PPN salah satunya pada barang ke-

butuhan pokok.

Rencana pajak sembako ini pun menuai komentar dari berbagai pihak. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut rencana pemerintah untuk menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak sebagai sebuah langkah panik.

"Ini langkah panik pemerintah melihat utang yang menggunung dan penerimaan pajak yang menurun. Mestinya di masa pandemi pemerintah bisa bekerja lebih cerdas tidak dengan menaikkan pajak, apalagi terhadap kebutuhan pokok, tapi memperkuat industrialisasi dengan menggunakan energi terbarukan," cuitnya melalui akun Twitter @MardaniAliSera.

Lebih lanjut, dia menilai rencana tersebut merupakan dampak dari investasi yang tidak strategis pada infrastruktur yakni tidak didukung dengan pembangunan zona industri dan memperkuat inovasi teknologi.

"Sekali lagi ini langkah panik yang bisa makin membebani ekonomi Indonesia," cuitnya kemudian. ● han



IDN/ANTARA

## MARINIR INDONESIA-AMERIKA LATIHAN TEMBUS GELOMBANG

Prajurit Batalyon Intai Amfibi (Yontafib) Korps Marinir TNI AL menerangi gelombang dalam Latihan Bersama United States Marines Corps Reconnaissance Unit dengan sandi Reconex 21-II di Pusat Latihan Pertempuran Marinir (Puslatpurmar) 7 Lampon, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (11/6). Latihan tersebut sebagai penyamaan persepsi pasukan elit kedua negara dalam menerapkan kecermatan, ketelitian, kecepatan dan kekompakan dalam tim.

## Peradilan Umum Paling Banyak Dilaporkan ke KY

JAKARTA (IM) - Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta mengatakan, peradilan umum merupakan institusi hukum yang paling banyak dilaporkan ke lembaganya oleh masyarakat.

Berdasarkan data yang dimiliki Violetta, pada periode Januari hingga Mei 2021 terdapat 452 pengaduan terkait peradilan umum.

"Selama periode tersebut total ada 601 laporan yang diterima KY dan didominasi oleh peradilan umum," kata Violetta seperti dikutip dari Antara, Jumat (11/6).

Violetta menjelaskan bahwa KY juga menerima 42 laporan yang ditujukan kepada pengadilan agama, Mahkamah Agung 38 laporan, dan pengadilan niaga 18 pengaduan. Kemudian, pengadilan tindak pidana korupsi sebanyak 15 aduan, peradilan tata usaha negara 14 aduan, pengadilan hubungan industrial delapan aduan, serta peradilan militer dan Mahkamah Konstitusi masing-masing dua pengaduan.

"Sisanya 10 pengaduan masuk ke bagian lain-lain," katanya. Selain itu, KY juga menerima data ada sebanyak 1.011 laporan dan surat tembusan, jika dirincikan laporan langsung

ke KY sebanyak 177, melalui pos 296. Lalu pengaduan secara daring atau online sebanyak 124 aduan dan berdasarkan informasi sebanyak empat aduan.

"Untuk surat tembusan yang diterima KY sebanyak 410. Jadi, total sebanyak 1.011 laporan dan surat tembusan," ujarnya.

Sementara dalam laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Violetta juga mengumumkan 10 provinsi yang paling banyak diadakan oleh masyarakat.

Adapun provinsi tersebut yakni DKI Jakarta sebanyak 148 laporan, Jawa Timur 58, Sumatera Utara 57 aduan, 49 laporan di Jawa Barat. Kemudian Jawa Tengah 25 laporan, serta Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan masing-masing 24 laporan.

KY juga menerima laporan dari Provinsi Riau sebanyak 22 aduan, Sulawesi Selatan 20 laporan, dan 16 laporan dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

Terkait dengan usulan sanksi, KY mendata sanksi ringan sebanyak 47, sanksi sedang 14, serta sanksi berat tiga usulan. Sementara dari hasil pleno menindaklanjuti laporan masyarakat, sebanyak 35 terbukti dan 81 tidak terbukti. ● han

## Buronan Kasus Korupsi Sembunyi di Tengah Sawah Ditangkap Kejaksaaan

JAKARTA (IM) - Kejaksaaan Agung (Kejagung) dan Kejati Kalimantan Timur menangkap seorang buron kasus korupsi penyelewengan dana royalti Batubara di Tenggarong, bernama Hartono.

"Tabur (tangkap buronan) Kejaksaaan Agung bersama Kejati Kalimantan Timur dan Kejari Tenggarong mengamankan buronan tindak pidana korupsi atas nama Hartono," kata Kapuspemkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simajuntak dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (11/6).

Leonard mengungkapkan, buron tersebut ditangkap ketika mencoba bersembunyi dari kejaran aparat penegak hukum di tengah sawah, Desa Loa Ulung, Tenggarong, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. "Tersempit diamankan saat sedang bersembunyi dalam pondok di tengah sawah, karena tersangka tidak tinggal di kediamannya untuk menghindari pemantauan dan penangkapan," ujar Leonard.

Dalam perkara ini, Hartono diduga telah membuat negara merugi sebesar

Rp4.800.000.000. Ia sebenarnya sudah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Namun, ia tidak kooperatif dalam hal tersebut. Sehingga, kata Leonard, yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan akhirnya ditangkap oleh tim Kejaksaaan.

"Kami mengimbau kepada seluruh DPO Kejaksaaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para buron," tutur Leonard. ● mei

## Terungkap, Prajurit TNI AU Ternyata Tertembak Senjata Sendiri

LAMPUNG (IM) - Misteri penembakan terhadap prajurit TNI AU Pratu Nur Rohman bersama istrinya terkuak. Sebelumnya dikabarkan keduanya ditembak orang tak dikenal (OTK), namun dari hasil investigasi tim gabungan ternyata tidak demikian.

Keduanya tertembak akibat kelalaian Pratu Nur yang mengakibatkan senjata miliknya meletus.

Tim gabungan dari Sateskrim polresta Bandar Lampung bersama Datasemen

Polisi Militer AU Lanud Panteran Bunyamin telah melakukan investigasi terkait kasus ini selama tiga hari.

Tim gabungan menemukan fakta bahwa keduanya bukanlah korban pembegalan melainkan korban penembakan akibat kelalaian sendiri.

Komandan Lanud Panteran Bunyamin, Letkol Nav Yohanes Ridwan mengatakan, pihak TNI AU belum bisa memaparkan kronologi ledakan senjata milik Pratu Nur Rohman yang menyebabkan

istrinya tertembak.

"Penyelidikan telah diserahkan sepenuhnya ke pihak Denpom AU. Soal sanksi ke prajurit, pihak Lanud belum bisa berkomentar karena masih akan didalami," ujar Yohanes, Jumat (11/6/2021).

Atas kegaduhan yang telah terjadi, Yohanes meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hingga saat ini Pratu Nur Rohman bersama istrinya masih menjalani perawatan di RS Advent Bandar Lampung. ● mei



IDN/ANTARA

## KEPALA BNPB KUNJUNGI RSLKI

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito (kiri) didampingi Penanggung jawab Rumah Sakit Lapangan Kogabwilhan II Indrapura (RSLKI) Laksamana Pertama TNI I Dewa Gede Nalendra Djaya Iswara (keempat kanan) meninjau kondisi di luar RSLKI Surabaya, Jawa Timur, Jumat (11/6). Kunjungan tersebut untuk meninjau kondisi serta sarana dan prasarana di RSLKI sebagai upaya untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Timur.

## Prabowo Segera Datangkan 8 Kapal Perang Fregat Buat Italia

JAKARTA (IM) - Perusahaan pembuat kapal asal Italia, Fincantieri mengumumkan telah menandatangani kontrak kerja sama dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia untuk menyuplai delapan kapal perang jenis fregat.

Dari kesepakatan tersebut, Fincantieri akan menyuplai enam fregat kelas FREMM dan dua fregat bekas kelas Maestrale.

"Fincantieri akan menjadi kontraktor utama untuk keseluruhan program," demikian informasi dari laman Fincantieri dikutip pada Jumat (11/6).

Fincantieri mengklaim, kesepakatan ini sangat penting untuk memperkuat kerja sama antara dua negara di kawasan strategis Pasifik.

Selain itu, pembuatan

fregat dianggap tidak hanya berdampak signifikan untuk galangan kapal Italia di masa mendatang, tetapi juga untuk perusahaan lain di sektor yang sama, misalnya Leonardo.

Bahkan, Fincantieri tidak menutup kemungkinan akan menjalin kerja sama dengan PT PAL (Persero), sebuah perusahaan berpelat merah yang bermarkas di Surabaya, Jawa Timur.

Adapun dua fregat bekas kelas Maestrale akan mulai dikerjakan Fincantieri setelah Angkatan Laut (AL) Italia menghentikan operasional kapal tersebut.

"Modernisasi dua kapal kelas Maestrale, yang akan diperoleh Fincantieri dari Angkatan Laut Italia setelah dinonaktifkan, juga akan dilakukan di Italia," kata Fincantieri. ● han

## Kemenhan Klaim Hampir 10 Ribu Orang Daftar Komponen Cadangan

JAKARTA (IM) - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mencatat hampir sebanyak 10.000 orang yang telah mendaftarkan diri masuk dalam komponen cadangan (Komcad). Para pendaftar masuk kedalam pendaftaran gelombang pertama yang berlangsung pada 2-7 Juni 2021.

Juru Bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, antusiasme masyarakat yang cukup tinggi terkait dengan Komcad membuktikan mereka amat ingin berkontribusi lebih terhadap pertahanan negara.

"Jumlah pendaftar sangat antusias, sampai ditutup jumlah pendaftar baik online maupun offline mendekati 10 ribu orang," ujar Dahnil melalui keterangan tertulis, Jumat (11/6).

Setelah proses pendaftaran, sambung Dahnil, seluruh pendaftar akan melalui tahapan seleksi kompetensi di Rindam-Rindam yang ada di pulau Jawa. Seleksi kompetensi tersebut dimulai sejak tanggal 7 Juni sampai dengan 17 Juni mendatang.

Dia memaparkan, jika dalam tahap ini lolos, maka peserta berhak mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil)

selama tiga bulan. Nantinya, jelas dia, hanya dipilih 2.500 orang untuk mengikuti Latsarmil yang mulai 21 Juni sampai 21 September.

"Setelah itu akan ditetapkan sebagai anggota Komcad guna memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI kita untuk pertahanan negara," ungkapnya.

Sebagai informasi, Kemhan telah resmi membuka seleksi pendaftaran Komcad 2021. Seleksi tersebut dalam rangka memperkuat pertahanan negara melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sekaligus memenuhi hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara. ● han

### PERMOHONAN MAAF

PT JAYA BERSAMA SAPUTRA SEJAHTERA dengan ini meminta maaf kepada bapak Muhamad Samsudin Dajat Hardjakusumah selaku pencipta lagu dan kepada PT. MASSIVE MUSIC ENTERTAINMENT selaku music publisher/penerbit musik yang merupakan pemegang kuasa yang sah atas pengelolaan hak ekonomi atas hak cipta lagu " Anak Bertanya Pada Bapaknyanya", karena telah menggunakan lagu tersebut pada platform youtube dan Instagram Pintu Baja Fortress dan berjanji untuk tidak melakukan hal tersebut di waktu yang akan datang.